

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN  
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETERANDALAN  
PELAPORAN KEUANGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program S1 Akuntansi*



**Oleh:**

**SERI KEMALA/1103187**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2015**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

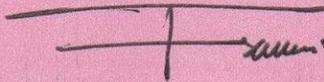
PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

Nama : Seri Kemala  
NIM/BP : 1103187/2011  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, 2015

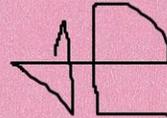
Disetujui oleh:

Pembimbing I



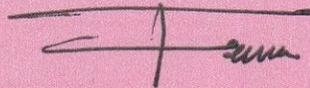
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199003 1 003

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199003 1 003

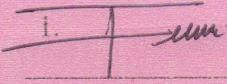
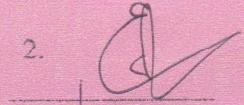
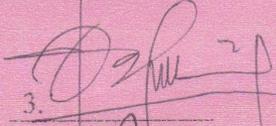
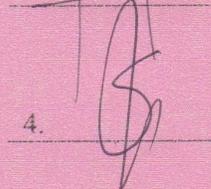
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi  
Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan  
Nama : Seri Kemala  
TM/NIM : 2011/1103187  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2015

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2.	Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	
3.	Anggota	: Halmawati SE, M.Si	
4.	Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si,	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Seri Kemala  
NIM/ Th. Masuk : 1103187/2011  
Tempat/Tanggal Lahir : Balai Tengah/18 Mai 1993  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Tempua 15 Air Tawar Barat, Padang  
No. Hp/Telepone : 085265638331  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar *rakademik (sarjana)* baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 2015

Yang membuat pernyataan.



**Seri Kemala**

NIM : 1103187/2011

## ABSTRAK

**Seri Kemala, 1103187/2011. PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN**

**Pembimbing : 1. Fefri Indra Arza,SE,M.Sc,AK  
2. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan, dan (2) Pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Solok. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *total sampling* dengan jumlah responden sebanyak 78 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis jalur (*path analysis*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan, dan (2) komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

**Kata kunci: Pengawasan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Keterandalan Pelaporan Keuangan**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis dibimbing dan dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fefri Indra Arza SE,M.Sc,Ak selaku pembimbing I dan Bapak Henri Agustin,SE,M.Sc,Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Halmawati,SE, M.si dan Ibu Salma Taqwa SE,M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang. Serta Kakak Syamsariani selaku tenaga administrasi program studi Akuntansi.

5. Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing akademik.
6. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Refriyatman dan Ibu Asmar, adik-adik Muhammad Ridha, Ikhlahul Amal yang tiada henti-hentinya berdoa, memotivasi, dan memberi semangat untuk selalu bangkit serta mencurahkan segala perhatiannya bagi penulis.
9. Sahabat tersayang di Prodi Akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yaitu Daryanti Anggun Kusuma, Rizki Lusiana, Lola Yuli Asmara, dan Novita Sri Wahyuni yang tiada henti-hentinya berdoa, memberikan semangat dan bantuan baik moral maupun materi untuk selalu bangkit, serta mencurahkan perhatiannya bagi penulis.
10. Semua sahabat seperjuangan di kos tercinta Tempua 15 atas yang sama-sama berjuang memotivasi, saran, dukungan, serta bimbingan konseling karena mereka mayoritas Fakultas Ilmu Pendidikan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
11. Semua sahabat seperjuangan di Prodi Akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis telah melakukan yang terbaik dalam proses penyusunan skripsi ini, namun kritik dan saran tetap sangat penulis harapkan demi perbaikan kearah yang lebih baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, April 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian .....	8
D.Manfaat Penelitian.....	9
<b><u>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN</u></b>	
<b><u>    HIPOTESIS.....</u></b>	<b><u>10</u></b>
A.Kajian Teori .....	10
1.keterandalan pelaporan keuangan .....	10
2.pengawasan keuangan daerah.....	15
3.komitmen organisasi .....	20
B.Evaluasi Penelitian Terdahulu .....	25
C.Hubungan Antar Variabel .....	28
D.Kerangka Konseptual.....	30
E.Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A.Jenis Penelitian .....	33
B.Populasi dan Sampel.....	33
C.Jenis Data dan Sumber Data.....	35
D.Teknik Pengumpulan Data.....	35
E.Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	36
F.Instrumen Penelitian.....	37
G.Uji Validitas dan Reliabilitas .....	38
H.Uji Asumsi Klasik .....	39

I. Teknik analisis data.....	40
J. Definisi Operasional.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum .....	44
B. Demografi Responden .....	46
C. Deskripsi Variabel Penelitian .....	48
D. Statistik Deskriptif.....	52
E. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	54
F. Uji Asumsi Klasik.....	55
G. Uji Model.....	59
H. Pembahasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Keterbatasan Penelitian.....	69
C. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar SKPD yang Ada Di PEMDA Kota Solok.....	34
Tabel 2 Indikator Kuesioner .....	37
Tabel 3 Alternatif Jawaban.....	38
Tabel 4 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	46
Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	46
Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Penelitian Terakhir .....	47
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan.....	49
Tabel 8 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Keuangan Daerah	50
Tabel 9 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Komitmen Organisasi.....	52
Tabel 10 Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 11 Nilai <i>Corrected item-Total Colleration</i> terkecil.....	54
Tabel 12 Nilai <i>Cronbatch's Alpha</i> .....	55
Tabel 13 Uji Normalitas Residual.....	56
Tabel 14 Uji Multikonealitas.....	57
Tabel 15 Uji Heteroskedatisitas.....	59
Tabel 16 Anova.....	60
Tabel 17 Koefisien Determinan.....	61
Tabel 18 Regresi Berganda.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	31
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner .....	75
Lampiran 2 Tabulasi uji validitas .....	78
Lampiran 3 uji validitas dan reliabilitas.....	79
Lampiran 4 Tabulasi penelitian Y.....	83
Lampiran 5 Tabulasi penelitian X1.....	85
Lampiran 6 tabulasi penelitian X2.....	87
Lampiran 7 Analisis data penelitian.....	85

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini kebutuhan atas informasi keuangan yang informatif semakin meningkat, baik di sektor swasta maupun di sektor publik. Untuk itu penyajian laporan keuangan yang andal diperlukan agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberi informasi melalui angka-angka kuantitatif. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan semakin tepat jika informasi yang disajikan secara andal, tanpa keterandalan laporan keuangan dikhawatirkan keputusan yang diambil akan meleset.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Perkembangan akuntansi sektor publik yang semakin pesat menimbulkan tuntutan yang lebih besar terkait dengan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2005).

Laporan keuangan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi. Laporan keuangan sangat penting untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam

penyusunan laporan keuangan, yaitu: mudah dipahami, relevan, keterandalan, dapat diperbandingkan.

*Pertama*, mudah dipahami (*understandability*). Ini berarti bahwa kualitas penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari dengan ketekunan yang wajar.

*Kedua*, relevan (*relevance*). Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi dari tindakan yang diambil.

*Ketiga*, keterandalan (*reliability*). Keterandalan merupakan kualitas informasi yang disampaikan laporan keuangan menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. keterandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

*Keempat*, dapat diperbandingkan (*comparability*). Suatu laporan keuangan dapat diperbandingkan apabila informasi tersebut dapat saling

diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Laporan keuangan mempunyai peranan penting bagi banyak pihak, sehingga ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat dibutuhkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material menyajikan setiap fakta dengan jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dampak dari diperolehnya opini selain WTP atas laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah.

2. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai informasi yang ada ternyata dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini bisa dilihat dari opini audit yang diterima oleh Kota Solok pada tahun 2013 yang mana Kota Solok mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang mana hal ini merupakan penurunan kualitas opini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) .

Penurunan opini audit ini salah satunya diakibatkan oleh kurang andalnya laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah Kota Solok, hal ini juga dibuktikan dengan adanya nota penjelasan atas raperda pertanggungjawaban APBD Kota Solok yang disampaikan oleh walikota Solok yang mana nota penjelasan tersebut telah dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan juga telah tepat pada waktunya namun keandalanpelaporan keuangan daerah harus ditingkatkan.

Atas penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelaporan keuangan Kota Solok diakibatkan oleh kurang andalnya laporan keuangan meskipun tidak dijelaskan secara nyata hal tersebut namun secara

tersirat hal tersebut bisa dibuktikan. Dengan opini WDP yang diterima oleh Kota Solok tahun 2013 maka membuat hal ini menjadi menarik untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan komitmen organisasi terhadap keterandalan laporan keuangan.

Beberapa penelitian terkait yaitu penelitian Desmiyawati (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktuan pelaporan keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan PEMDA, sementara teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan PEMDA.

Jadi pengawasan keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan karena pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjada legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif.

Penelitian dari Mustafa, dkk (2009) yang berjudul analisis faktor-faktor yang berpengaruh keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan

pada SKPD pemerintah daerah Kota Kendari. Jenis penelitian adalah deskriptif verifikatif (*causal*) yang bertujuan untuk memberi gambaran (deskripsi) dari variabel-variabel yang diteliti dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis.

Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan *mailed survey method* dan *direct survey method*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel *exogenous* (Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) terhadap variabel endogen (Keterandalan Laporan Keuangan dan Ketepatan Waktuan Laporan Keuangan) melalui sebuah pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktuan pelaporan keuangan.

Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan bisa disebabkan karakteristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktuan bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan

untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Dari uraian di atas diketahui bahwa penelitian ini telah banyak dilakukan sebelumnya, dan dapat kita lihat pula bahwa hasil penelitian-penelitian tersebut masih sangat bervariasi. Hal ini dapat diakibatkan oleh

adanya perbedaan variabel penelitian, dan tempat penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar para pemakai laporan keuangan pemerintah daerah bisa mengguna laporan keuangan sebaik mungkin dan para pengambil keputusan laporan keuangan bisa mengambil keputusannya dengan tepat. Sehingga dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan judul di atas adalah :

1. Se jauh mana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan laporan keuangan?
2. Se jauh mana pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan laporan keuangan?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang sesuai dengan judul di atas adalah :

1. Mengetahui se jauh mana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan laporan keuangan
2. Mengetahui se jauh mana pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan laporan keuangan

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### 1. Bagi *stake holders*

Diharapkan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan informasi.

##### 2. Bagi PEMDA

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pemikiran dalam menentukan kebijaksanaan organisasi dalam berbagai hal oleh para manejer publik.

##### 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan-temuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya pengungkapan laporan keuangan yang andal.

##### 4. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Keterandalan Laporan Keuangan**

###### **a. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai informasi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan (PP 71 Tahun 2010).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

###### **1) Akuntabilitas**

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

###### **2) Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan

fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu: penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, dapat diverifikasi (*verifiability*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**b. Pengertian Keterandalan Laporan Keuangan**

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Suwardjono,2004). Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP 71 Tahun 2010), informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut informasi akan memiliki nilai yang tinggi kalau pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran informasi. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatan waktu untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatan waktu dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data

secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara material. Dengan begitu ketepatan waktu dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan.

### **c. Karakteristik informasi yang andal**

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
3. Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

## **2. Pengawasan Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi pemerintah (Desmiawati, 2014).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan,

serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah (Yosa, 2010).

#### **b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja

pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

### c. Jenis-jenis pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah

dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

4. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya:

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
- c. Struktur APBD
- d. Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD
- e. Penyusunan dan penetapan APBD
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD
- g. Penatausahaan keuangan daerah
- h. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
- j. Pengelolaan kas umum negara

- k. Pengelolaan piutang daerah
- l. Pengelolaan investasi daerah
- m. Pengelolaan barang milik negara, Pengelolaana cadangan
- n. Pengelolaan utang daerah
- o. Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah
- p. Penyelesaian kerugian daerah
- q. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **3. Komitmen organisasi**

#### **a. Pengertian Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Robbins

didefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam organisasi sekolah guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa, maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap sekolah tempat bekerja.

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang diprioritaskan. Individu dengan komitmen organisasi yang kuat dalam dirinya akan berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi serta berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Sebaliknya, individu dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadinya.

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhinya (Mardiasmo,

2009). Semakin tinggi tingkat ketidak pastian dan ketidak stabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

#### **b. Pemberdayaan komitmen organisasi**

Pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat komitmen organisasi yaitu:

##### **1. Lama bekerja**

Merupakan waktu yang telah dijalani seorang dalam melakukan pekerjaan pada perusahaan. Semakin lama seseorang bertahan dalam perusahaan maka terlihat bahwa dia berkomitmen terhadap perusahaan.

##### **2. Kepercayaan**

Setelah pemberdayaan dilakukan oleh pihak manajemen, langkah selanjutnya yaitu membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Adanya saling percaya diantara anggota organisasi akan tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa adanya rasa takut. Kepercayaan antara keduanya dapat diciptakan dengan cara antara lain: a) menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, b) menyediakan

pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan kerja, c) menghargai perbedaan pandangan dan perbedaan kesuksesan yang diraih karyawan, d) menyediakan akses informasi yang cukup.

### 3. Rasa percaya diri

Menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai kemampuan yang dimiliki karyawan sehingga komitmen terhadap perusahaan semakin tinggi. Keyakinan karyawan dapat ditimbulkan melalui antara lain: a) mendelegasikan tugas penting kepada karyawan, b) menggali saran dan ide dari karyawan, c) memperluas tugas dan membangun jaringan antar departemen, d) menyediakan instruksi tugas untuk penyelesaian pekerjaan yang baik.

### 4. *Credibilitas*

Menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki kinerja tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: a) memandang karyawan sebagai partner strategis, b) peningkatan target di semua bagian pekerjaan, c) mendorong inisiatif individu untuk melakukan perubahan melalui partisipasi, d) membantu menyelesaikan perbedaan dalam penentuan tujuan.

### 5. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban karyawan pada wewenang yang diberikan dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja karyawan. Tahap ini

sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam penyelesaian dan tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) menggunakan jalur training dalam mengevaluasi kinerja karyawan, b) memberikan tugas yang jelas dan ukuran yang jelas, c) melibatkan karyawan dalam penentuan standar dan ukuran kinerja, d) memberikan saran dan bantuan kepada karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Jika karyawan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pekerjaannya, kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, adanya pengalaman yang baik dalam bekerja dan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari organisasi untuk membantu karyawan baru dalam belajar tentang organisasi dan pekerjaannya, maka akan tercipta komitmen pada organisasi.

## **B. Evaluasi Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Mustafa dkk pada tahun 2009 yang berjudul analisis faktor-faktor yang berpengaruh keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari yaitu jenis penelitian adalah deskriptif verifikatif (*causal*) yang bertujuan untuk memberi gambaran (deskripsi) dari variabel-variabel yang diteliti dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis.

Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan *mailed survey method* dan *direct survey method*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel *exogenous* (Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian

Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) terhadap variabel *endogen* (Keterandalan Laporan Keuangan dan Ketepatan waktu laporan keuangan) melalui sebuah pendekatan *Partial Least Square* (PLS) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Kendari. SKPD ini meliputi dinas, badan, kantor, dan RSUD. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan bisa disebabkan memang karakteristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

Jadi hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

Desmiyawati (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Sampel penelitian adalah kepala dan staf sub bagian akuntansi/penata usahaan keuangan tiap SKPD di Pemerintah Provinsi Riau, Kotamadya Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kampar. Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan 361 kuisisioner kepada kepala dan staf sub bagian akuntansi/penata usahaan keuangan tiap SKPD tersebut. Data yang terkumpul diolah menggunakan SPSS 17 dengan Regresi Linear Berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemda, sementara teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemda.

Jadi hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan Pemda, sementara teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemda.

Penelitian Joe Sugandi yang berjudul pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan IT, dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (survey pada SKPD se-Kabupaten Kuansing). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Pada Kualitas laporan keuangan oleh Ayu Ratna Dewi dan Ni Putu Sri Harta Mimba. Penerapan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya, berperan cukup penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar dengan jumlah SKPD sebanyak 34 unit sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang operator SIPKD. Teknik analisis kuantitatif serta analisis regresi linear sederhana digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil analisis menunjukkan tingkat efektivitas SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

Jadi hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan tingkat efektivitas SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar termasuk dalam kriteria efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.

### **C. Hubungan antar Variabel**

#### **1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan**

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010).

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah

ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Dalam kaitannya dengan keterandalan laporan keuangan, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

## **2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan**

Komitmen organisasi adalah keinginan untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk bekerja keras sesuai dengan keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian Aritonang dan Syarif (2009) yang meneliti mengenai keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keterandalan laporan keuangan pemerintah.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yaitu antara variabel dependen dan variabel-variabel independen. Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah, dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah, dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

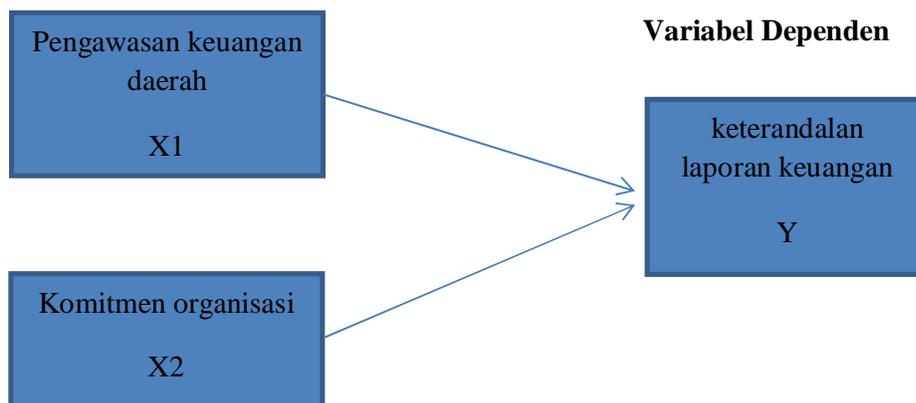
Pada penelitian ini ruang lingkupnya adalah SKPD pemerintah Kota Solok yang mana pengawasan keuangan daerah (X1), dan komitmen organisasi (X2) sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya sendiri adalah keterandalan laporan keuangan (Y). Pengawasan keuangan daerah menggambarkan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan komitmen organisasi menggambarkan suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak

organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Keandalan laporan keuangan menggambarkan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keterpautan dan ketepatan waktu untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatan waktu dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan.

Dari uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:

#### Variabel Independen (X)



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual yang ditetapkan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

H1: Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan

H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, hal ini dapat menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah di SKPD kota Solok dapat meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Solok.
2. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Solok, hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang di bangun oleh organisasi pada setiap SKPD di Kota Solok dapat meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Solok.

#### **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Solok, antara lain:

1. Wilayah penelitian hanya terbatas pada Kota Solok sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi kesemua objek secara keseluruhan.
2. Dari model penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan bahwa kontribusi variabel pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi adalah sebesar 47%, sedangkan selebihnya di tentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini sehingga dimungkinkan adanya variabel lain yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Solok.
3. Penyebaran kuesioner pada SKPD kota solok tidak dapat dilakukan secara keseluruhan hal ini disebabkan staf yang mengelola bagian keuangan tidak bisa memberikan pendapat atau opini melalui kuesioner yang disebar dengan alasan kesibukan dan karena sedang melakukan dinas luar.

### **C. Saran**

Berdasarkan keterbatasan tersebut di atas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas wilayah penelitian sehingga penelitian dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang memengaruhi keterandalan pelaporan keuangan selain dari Pengawasan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi.
3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner digunakan metode pengumpulan data dengan cara survei lapangan dan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang lebih baik dan untuk mendapatkan informasi selain yang telah ada di kuesioner karena terkadang kuesioner ada yang tidak kembali.